

## Manifestasi konsep kosmologi Jawa dalam perkembangan pola ruang kawasan pusat pemerintahan Surakarta

*The manifestation of Javanese cosmology concepts in the dynamic of spatial pattern of Surakarta's administrative center*

**A A Urfan<sup>1</sup>, I Aliyah<sup>1</sup>, dan G Yudana<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Corresponding author's email: [arnindyaurfan@outlook.com](mailto:arnindyaurfan@outlook.com)

**Abstrak.** Pusat pemerintahan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan politis dan administratif bagi suatu wilayah. Kota Surakarta yang sebelumnya merupakan ibukota Kerajaan Mataram Islam telah mengalami banyak perkembangan termasuk pada kawasan pusat pemerintahan. Terbentuknya Kota Surakarta pada awalnya didasari oleh konsep kosmologi Jawa, yaitu kepercayaan dan cara pandang masyarakat Jawa terhadap dunia, serta keterkaitan manusia dan lingkungan pada penataan ruang. Sebagai kota budaya pada masa kini, elemen kebudayaan tidak lagi menonjol dalam penataan pusat pemerintahan. Hal ini melatarbelakangi kajian manifestasi konsep kosmologi Jawa pada dinamika pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta. Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang mencakup (1) identifikasi konsep kosmologi Jawa, (2) analisis pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa, dan (3) perkembangan pola ruang pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta adalah satu-satunya pusat pemerintahan yang menggunakan kosmologi Jawa dalam penataan ruangannya. Walaupun demikian, beberapa konsep dari kosmologi Jawa, seperti mancalima dan mancapat, saat ini sudah hilang akibat peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Kota Surakarta.

*Kata Kunci: Konsep Kosmologi Jawa; Pusat Pemerintahan; Pola Ruang*

**Abstract.** Administrative center is a designated area where the governing process take place. The city of Surakarta, which was previously the capital of the Islamic Mataram

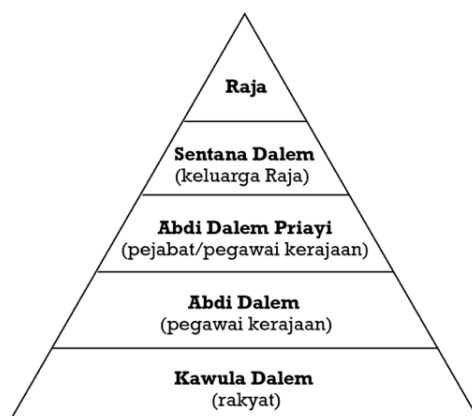
Kingdom, has gone through three era, brought changes to the administrative center spatial pattern. The formation of Surakarta City was initially based on the concept of Javanese cosmology, i.e. the beliefs and perspectives of the Javanese people towards the world, as well as the relationship between humans and the environment in spatial planning. As a city of culture today, cultural elements are no longer prominent in the arrangement of the administrative center. So, this study is needed to reveal the manifestation of Javanese cosmology concepts in the dynamics of the spatial pattern of Surakarta administrative center. This paper employed descriptive analysis in three stages: (1) identification of Javanese cosmological concepts, (2) analysis of administrative center spatial patterns based on Javanese cosmology concepts, and (3) dynamics of administrative center spatial pattern in three era. The results showed that the Surakarta Kasunanan Palace is the only administrative center applying Javanese cosmology concepts in its spatial pattern. However, some concepts, such as *mancalima* and *mancapat*, have been lost due to political and social events in Surakarta over time.

*Keywords: Administrative Center; Javanese Cosmology Concept; Spatial Pattern*

## **1. Pendahuluan**

Selama dua abad (1745-1945), Kota Surakarta tumbuh sebagai ibukota kerajaan di Jawa. Meskipun peran raja sebagai pemimpin wilayah banyak mendapat campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda [1], tatanan Surakarta masih menerapkan prinsip kosmologi Jawa dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari tata letak bangunan hingga pembagian wilayah berdasarkan jabatan dan struktur sosial di masyarakat. Berdasarkan fakta sejarah, perkembangan Kota Surakarta pada jaman dahulu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran, Benteng Vastenburg (pusat pengawasan Hindia Belanda terhadap Surakarta), serta Pasar Gedhe Hardjonagoro (pusat perekonomian kota). Pasca kemerdekaan, pada tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran [2].

Adanya suatu konsepsi kosmologi yang diakui sebagai dasar untuk penataan wilayah, ruang, dan bangunan adalah sebuah kondisi yang memungkinkan struktur ruang dan kota dapat berfungsi sebagai unsur pembentukan masyarakat. Kota Surakarta yang pernah menjadi ibukota kerajaan di Jawa pun juga menerapkan konsepsi kosmologi dalam penataan ruangnya. Konsep tata ruang dan tata bangunan dalam kosmologi Jawa berhubungan erat dengan prinsip filsafat yang dipahami oleh masyarakat Jawa sebagai kesatuan kolektif antara keyakinan dan kebudayaan. Struktur keruangan kota disusun dari sistem klasifikasi dalam kosmologi yang diaplikasikan di dalamnya. Selain itu, kosmologi Jawa juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan bangunan, sehingga struktur keruangan dan bangunan tidak semata-mata merupakan sebuah wadah, melainkan menjadi suatu keterpaduan dengan aktivitas di dalamnya yang menjadikan kedua hal tersebut memiliki makna dan mencerminkan sistem kemasyarakatan yang berlaku [3].



**Gambar 1.** Struktur klasifikasi sosial masyarakat Jawa [4].

Pada kosmologi Jawa penataan ruang dibagi berdasarkan beberapa konsep, di antaranya yaitu mancapat, mancalima, catur gatra tunggal, dan kiblata papat lima pancer. Konsep mancapat merupakan pembagian wilayah berdasarkan angka empat yang memiliki filosofi bagi masyarakat Jawa. Angka empat ini digambarkan melalui empat penjuror mata angin di bagian barat, timur, utara, dan selatan, serta dalam pembagian tempat tinggal masyarakatnya. Lapisan pertama yaitu kedhaton diperuntukkan bagi raja, permaisuri, dan putra-putrinya, kemudian di kuthagara terdapat para sentana dhalem, selanjutnya di paseban dihuni oleh abdi dalem, dan alun-alun yang merupakan tempat tinggal kawula dalem [5].

Selanjutnya terdapat konsep mancalima yang merupakan pembagian berdasarkan lingkaran hirarkis dan acuan sistem sosial di masyarakat yang membentuk lingkaran-lingkaran administratif wilayah kerajaan menjadi beberapa bagian, yaitu negara, kuthanegara, negara agung, mancanegara. Negara merupakan wilayah yang menjadi tempat tinggal petinggi kerajaan dan kaum bangsawan [6]. Berbagai fasilitas seperti alun-alun, gedung pemerintahan, dan masjid agung berada di dalam negara [7]. Kuthanegara adalah bagian wilayah yang mengelilingi keraton secara langsung. Dalam Bahasa Jawa, kutha memiliki arti pertahanan. Oleh karena itu, Kuthanegara dianggap sebagai pertahanan ekonomi karena fungsinya sebagai perkotaan yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat Negara Agung yang merupakan daerah inti wilayah kerajaan. Hampir seluruh wilayah di Negara Agung dibagi menjadi sejumlah gaduhan yang merupakan tanah garapan atau tanah siap pakai. Bagian terluar dari konsep mancalima adalah Mancanegara yang memiliki fungsi sebagai siti pamaosan atau tanah pajak [8]. Transformasi konsep mancapat-mancalima dalam struktur kota kerajaan Mataram Islam, disusun dengan pola sumbu “Utara-Selatan” dan “timur-barat”, yang juga dapat digambarkan dengan lingkaran-lingkaran imajiner. Sumbu “utara-selatan” bersifat sakral, sedangkan sumbu “timur-barat” bersifat profan [9].

Konsep yang lain adalah Catur Gatra Tunggal merupakan penataan kawasan berdasarkan empat penjuror mata angin. Elemen dari catur gatra tunggal, yaitu keraton, Alun-alun, Masjid Agung, dan Pasar [10]. Secara makrokosmos, lokasi keraton mempertimbangkan orientasi pada empat penjuror mata angin dan pusat dari empat mata angin tersebut (papat kiblata lima

pancer). Sisi utara mengacu pada keberadaan Btari Durga yang diyakini sebagai dewi Hutan Krendawahono, sisi timur mengacu pada Sunan Lawu dan Gunung Lawu, sisi Selatan mengacu pada keberadaan Ratu Kidul, serta sisi Barat kepada Kyai Sapu Jagad Gunung Merapi [8].

Terkait dengan fokus penelitian, kawasan pusat pemerintahan mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari perubahan sistem pemerintahan. Kawasan pusat pemerintahan adalah kawasan tempat berlangsungnya kegiatan politik dan administrasi pemerintahan, serta kegiatan lain yang terkait dalam pengelolaan suatu daerah [11]. Kawasan pemerintahan juga dapat berfungsi menjadi kawasan pusat kota yang kuat dan konsisten seperti yang biasa terjadi pada kebanyakan kota-kota lama pusat pemerintahan [12]. Penetapan “pusat pemerintahan” tidak lahir seiring dengan lahirnya daerah secara administratif, dan tidak dilegalkan secara perundangan nasional. Istilah ini lahir seiring dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk memindahkan fungsi pemerintahan pada wilayah lain [13]. Saat ini pusat pemerintahan memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal [14]. Untuk itu, penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan suatu kota akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain limitasi dan batasan dari kondisi fisik alamiah, serta kelayakan suatu lokasi dari perspektif non-fisik.

Berbagai gejolak politik yang dialami Surakarta sejak dipindahkannya Ibukota Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura hingga masa reformasi telah banyak membawa perubahan termasuk dalam sistem pemerintahan yang diterapkan. Peralihan sistem pemerintahan membawa berbagai fakta terhadap Kota Surakarta dari masa ke masa yang masing-masing memiliki kebijakan untuk mengelola wilayahnya. Kosmologi Jawa sebagai pakem atau konsep awal dipilihnya keraton sebagai pusat pemerintahan telah kehilangan banyak makna serta mengalami pergeseran fungsi. Hal ini menjadi isu ketika Kota Surakarta menetapkan *branding* sebagai kota budaya. Unsur kebudayaan dalam tata ruangnya sudah sangat samar untuk dapat menjadi keuntungan komparatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep kosmologi yang masih dapat diamati di Surakarta serta bagaimana perkembangannya berdasarkan periode pemerintahan yang berlaku melalui pemetaan cakupan wilayah pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa yang mengalami perkembangan seiring dengan peristiwa yang dialami.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka [15]. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif, yaitu melakukan pemilahan data yang terkait dengan penelitian [16]. Data yang dibutuhkan dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan cara observasi lapangan, yaitu kegiatan meninjau dan mengamati secara langsung fenomena dan kondisi yang ada di lapangan. Observasi dilakukan

untuk mendapatkan data lapangan, sementara wawancara dilakukan pada informan kunci yang dikelompokkan berdasarkan keahlian dan pengalaman langsung, seperti pihak keraton, budayawan, serta sejarawan. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan literatur/pustaka mengenai perkembangan pusat pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan kosmologi Jawa yang diperoleh dari buku, laporan, dokumen, karya tulis ilmiah, dan penelitian lain yang berhubungan. Pembahasan terhadap hasil penelitian menggunakan pendekatan pembahasan sejarah tematik. Pembahasan sejarah tematik membahas gagasan teoritik ilmu non-sejarah dan pemahaman problematika yang berkembang di perkotaan dengan model struktural dengan tetap memperhatikan aspek kronologis [17]. Pada penelitian ini, pembahasan dilakukan dengan memaparkan pemahaman pusat pemerintahan berdasarkan kosmologi Jawa sebagai isu disertai dengan penjelasan mengenai perkembangan Kota Surakarta dari periode ke periode.

### **3. Hasil penelitian dan pembahasan**

#### *3.1. Sejarah Kota Surakarta*

Perpindahan Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta sendiri terjadi akibat peristiwa Geger Pecinan. Pakubuwana II yang pada saat itu menjabat sebagai raja menandatangani perjanjian Liendmann yang menyebutkan bahwa setiap raja yang menjabat harus berterimakasih kepada Raja atau Ratu Belanda atas peminjaman kekuasaan [18]. Wilayah kekuasaan Raja Pakubuwana II saat itu, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian pesisir utara Jawa (Karisidenan Pati) dan bagian barat Jawa Timur [19].

Pada tahun 1755 terjadi Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang kemudian hal ini menyebabkan terbaginya wilayah kekuasaan hingga dinasti Kerajaan Mataram berakhir. Wilayah bekas Kerajaan Mataram ini selanjutnya disebut daerah Vorstenlanden (wilayah kerajaan yang terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta). Wilayah barat diserahkan kepada Surakarta dan wilayah timur yang mencakup Kediri dan Madiun diserahkan kepada Yogyakarta [20].

Setelah terbagi menjadi dua bagian kerajaan, pada tahun 1757 terjadi Perjanjian Salatiga yang membagi wilayah Surakarta dengan satu pemerintahan baru, yaitu Kadipaten Mangkunegaran yang mendapat bagian Surakarta bagian timur. Pada waktu ini Surakarta memiliki tiga pemerintahan, yaitu Kasunanan, Mangkunegaran, dan Kolonial. Pemerintahan kolonial memunculkan wilayah karesidenan yang diatur menurut tata cara Eropa pada tahun 1873. Pada masa periode pemerintahan kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah swapraja yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Swapraja Kasunanan (di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwana) dan Swapraja Mangkunegaran (di bawah kepemimpinan Adipati Mangkunegaran). Kedua daerah swaparaja ini dikuasai oleh seorang Gubernur Hindia Belanda. Sementara itu, pada masa kedudukan Inggris di Hindia Belanda, Pemerintah Inggris menetapkan bahwa tanah milik Mangkunegaran memiliki status *Erf-Ground*/turun temurun,

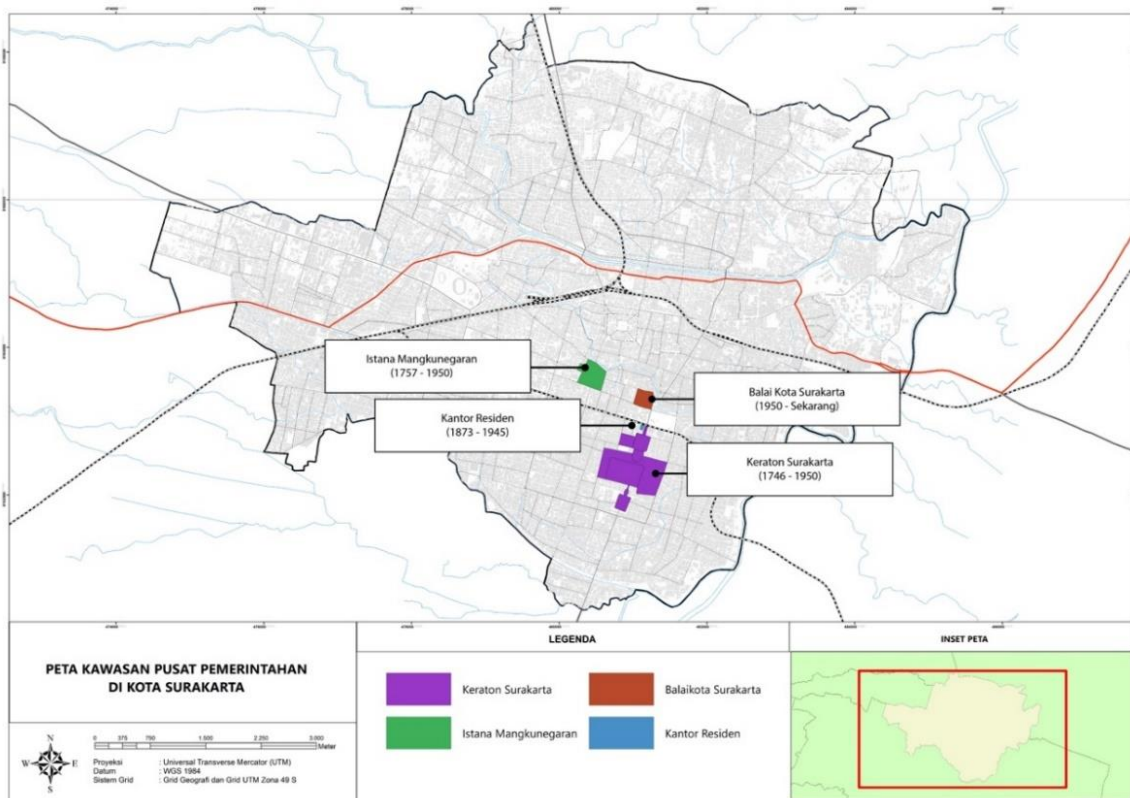
berbeda dengan status kepemilikan tanah kerajaan pendahulunya Surakarta dan Yogyakarta yang berstatus *Apanhage*/tanah lungguh.

Kemudian pada tahun 1873, residen membagi wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran yang dibagi dalam empat bagian (*afdeelingen*) yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen [21]. Kantor residen Surakarta berada di sebelah utara Keraton Kasunanan. Residen ini memiliki wewenang atas wilayah Vorstenlanden yang mencakup seluruh wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran yang dibagi ke dalam empat *afdeelingen* atau pembagian wilayah, yaitu Surakarta, Klaten, Boyolali, dan Sragen [22]. Semenjak dibentuknya pemerintahan karesidenan dan wilayah pesisir diambil alih oleh Belanda, dapat dikatakan bahwa konsep Mancalima sudah hilang dalam tata ruang wilayah keraton.

Selanjutnya pada tahun 1927, Kota Surakarta dibagi menjadi dua daerah kekuasaan berupa Kawedanan Distrik Surakarta dan Kawedanan Distrik Mangkunegaran. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 19 Agustus Presiden Soekarno memberikan piagam yang menyebutkan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai Daerah Istimewa. Peristiwa ini memunculkan dualisme pemerintahan di Surakarta, yaitu pemerintah kerajaan karena pemberian status istimewa, serta pemerintahan demokratis hasil perjuangan tokoh-tokoh dalam mengambil alih kekuasaan Jepang. Atas kejadian tersebut, dibentuklah Pemerintahan Direktorium dengan maksud untuk mengkoordinir Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran agar tergabung dalam satu pemerintahan. Rencana ini tidak berjalan mulus akibat kedua kerajaan ini tidak mengirim wakil-wakilnya sehingga menjadi penghalang dalam pembentukan satu sistem pemerintahan di Surakarta.

Kota Surakarta kembali menjadi karesidenan pada tahun 1946, dengan segala aset, instansi, dan pegawai milik Kasunanan dan Mangkunegaran diambil alih oleh pemerintah. Setahun setelahnya (1947), Kota Haminte Surakarta terbentuk. Kota Haminte Surakarta memiliki wilayah kerja yang meliputi sebagian dari kabupaten/kota Kasunanan dan Mangkunegaran, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kerten, Jajar, Sumber, Banyuanyar, dan Kabupaten Karanganyar, serta Kelurahan Kadipiro dan Mojosongo. Tahun 1948, akibat kemelut politik di Indonesia, terjadi perubahan pada sistem pemerintahan, yakni membagi Surakarta dalam daerah otonom besar dan daerah otonom istimewa dan menempatkan Surakarta pada klasifikasi kota besar. Selanjutnya, agresi militer Belanda yang memberikan perlindungan kepada Kasunanan dan Mangkunegaran untuk mewujudkan kembali pemerintah kerajaan (*swapraja*) membuat pemerintah pusat mengambil tindakan dengan membentuk pemerintah ilegal. Tindakan kedua belah pihak kerajaan tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana.

Akhirnya pada tahun 1950, semua instansi *swapraja* dibekukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu Mangkunegaran dan Susuhunan berubah menjadi suatu keluarga atau trah biasa dan keraton berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa.



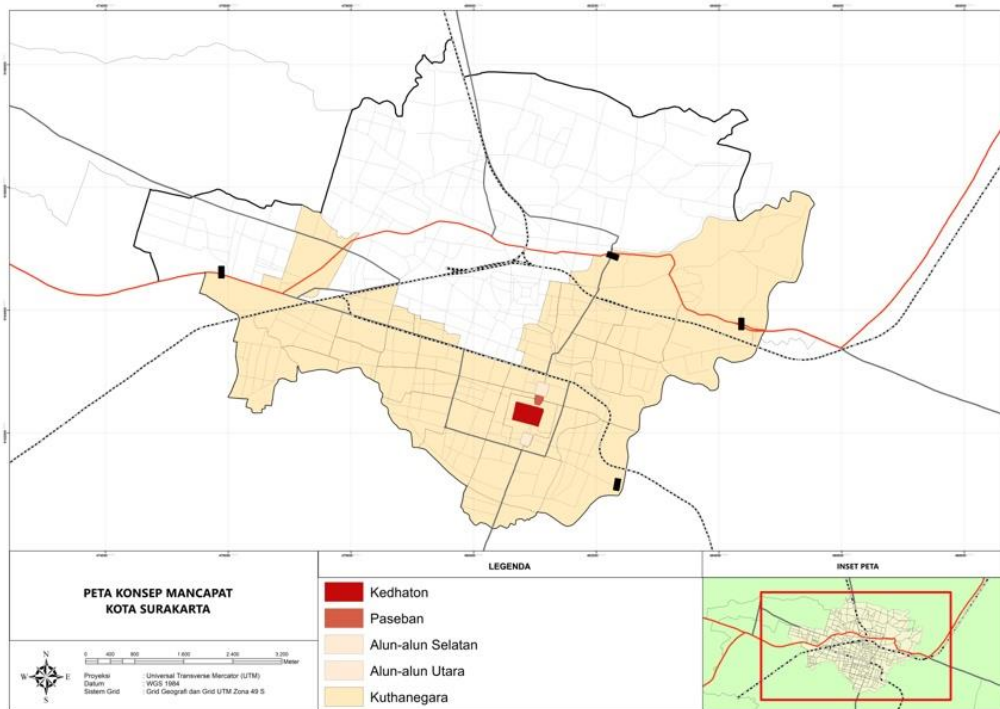
**Gambar 2.** Peta kawasan pusat pemerintahan di Kota Surakarta pada beberapa masa.

### 3.2. Implementasi Kosmologi Jawa di Kota Surakarta

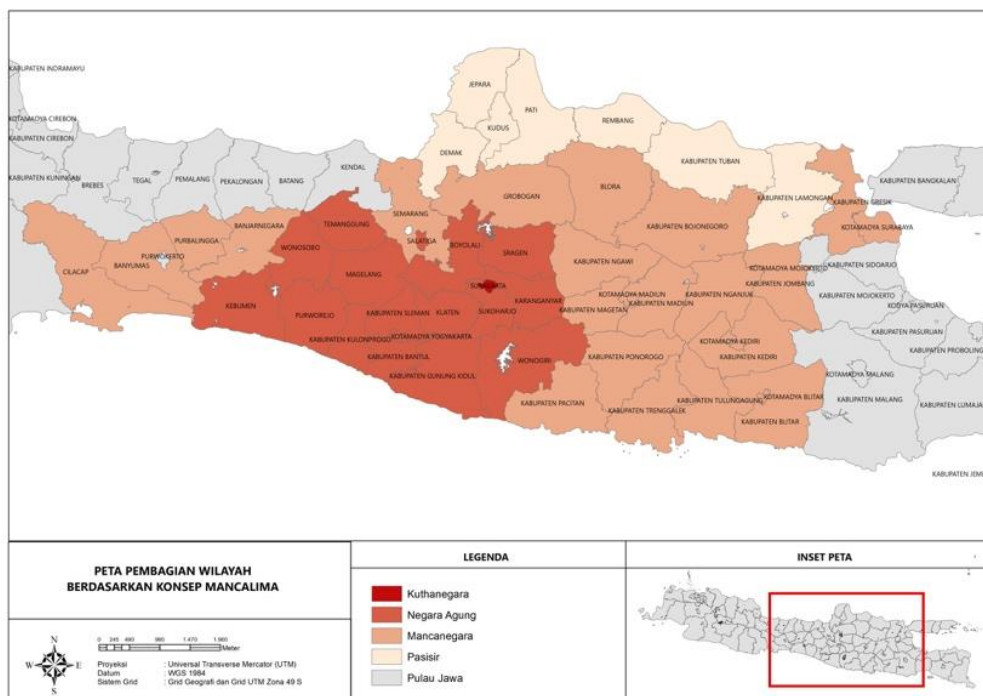
Keraton Surakarta sebagai pusat pemerintahan baru milik Kerajaan Mataram Islam memiliki banyak spekulasi pada sejarah pemilihan lokasinya. Satu pendapat yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa lokasi baru merupakan pilihan dari Ronggowarsito yang meramalkan bahwa tempat tersebut merupakan posisi terbaik. Pendapat lain dari sejarawan yang mengatakan bahwa pemilihan lokasi Keraton Surakarta banyak dipengaruhi oleh peranan Belanda karena kesepakatan antara Pakubuwana II dan Jenderal Van Hagedorp. Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, Surakarta banyak menerapkan pemahaman budaya dalam tata ruangnya. Budaya ini banyak dipengaruhi oleh klasifikasi sosial di masyarakat yang dibentuk berdasarkan kasta. Kasta atau klasifikasi masyarakat yang diterapkan berpengaruh terhadap tata ruang terutama dalam pembagian wilayah tinggalnya. Semakin tinggi status yang dimiliki oleh seseorang, maka ia akan bertempat tinggal di daerah perkotaan, dan semakin rendah statusnya, orang tersebut cenderung tinggal di kawasan perdesaan dan bekerja untuk para bangsawan.

Konsep kosmologi Jawa yang diterapkan di Kota Surakarta merupakan konsep yang sama pada tata ruang kerajaan Mataram Islam pendahulunya, seperti Pajang, Kota Gede, Plered, dan Kartasura. Konsep kosmologi yang terdiri atas empat konsep seperti dipaparkan di atas adalah suatu kearifan lokal yang menjadi ciri dari Kota Surakarta. Konsep Mancapat di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 3, konsep Mancalima dapat dilihat pada Gambar 4, serta Gambar

5 menunjukkan konsep Catur Gatra Tunggal. Untuk elemen-elemen pada setiap konsep, dapat dilihat secara detail pada Tabel 1. Setelahnya, konsep kiblat papat lima pancar dapat dilihat pada Gambar 6.

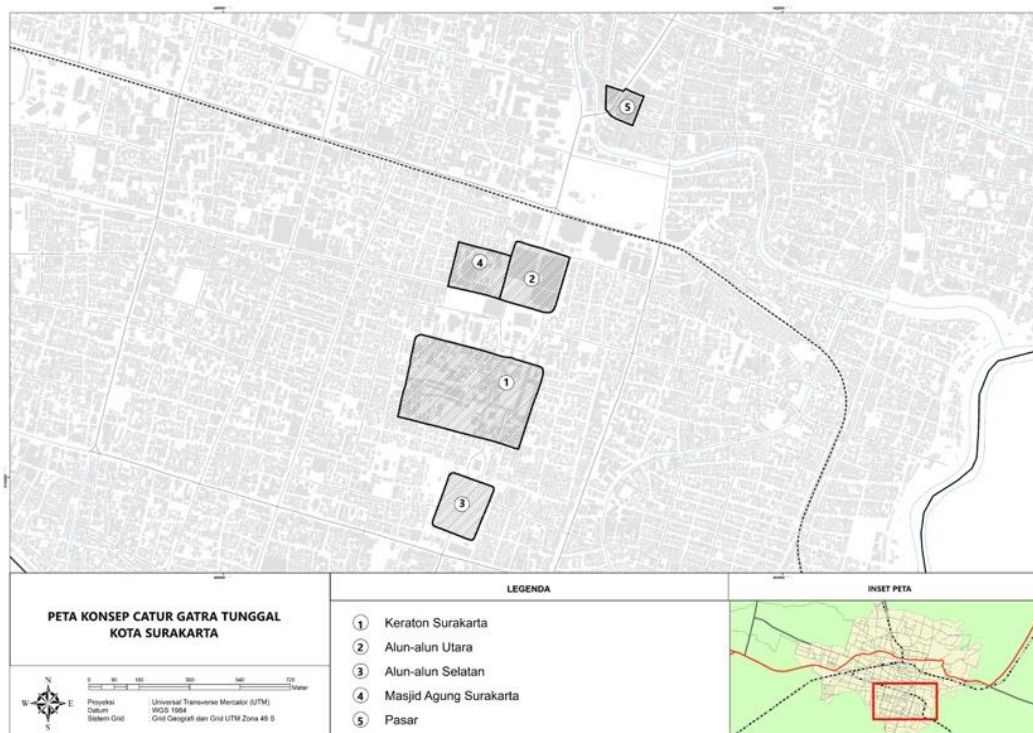


Gambar 3. Peta konsep Mancapat Kota Surakarta.



Gambar 4. Peta konsep Mancalima Kota Surakarta.



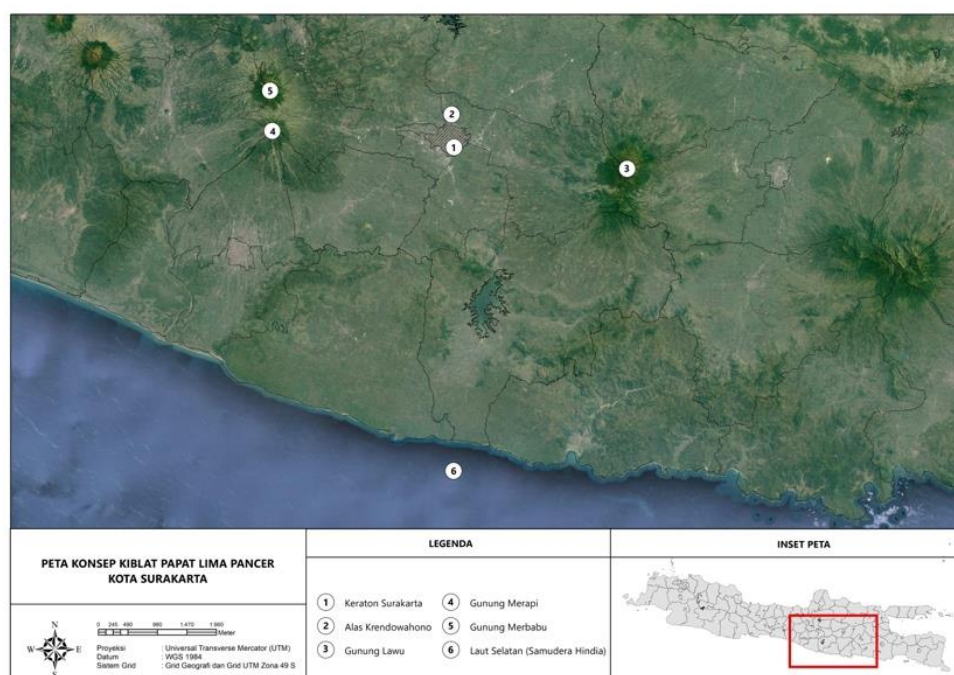


**Gambar 5.** Peta konsep Catur Gatra Tunggal Kota Surakarta

**Tabel 1.** Konsep dan komponen kosmologi Jawa di Kota Surakarta.

Konsep	Komponen	Uraian
Mancapat	Kedhaton	Konsep mancapat menunjuk pada arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Selain itu, konsep ini juga mengatur wilayah tempat tinggal masyarakat. Kedhaton merupakan tempat tinggal raja yang berada di dalam <i>negara</i> . Selanjutnya di <i>kuthagara</i> terdapat pejabat kerajaan dan berbagai fasilitas perkotaan. Kegiatan pemerintahan yang bersifat administratif tidak berlangsung di keraton melainkan dilaksanakan di Kepatihan. Selain itu, di dalam <i>kuthagara</i> juga terdapat tempat tinggal <i>abdi dalem</i> yang menempati kampung-kampung sesuai dengan profesi yang ditekuni, serta berbagai sarana perkotaan yang dibangun Belanda, seperti Benteng Vastenburg, Kantor Pos, Stasiun, dan permukiman di Loji Wetan. <i>Paseban</i> dan alun-alun merupakan bagian dari <i>kuthagara</i> yang di kawasan ini banyak dihuni oleh abdi dalem keraton (Dradjat, 2008).
	Kuthagara	
	Paseban	
	Alun-alun	
Catur Gatra Tunggal	Keraton	<i>Catur Gatra Tunggal</i> memiliki arti empat garis yang memusat pada satu titik. Empat garis ini mengacu pada arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat (Kusumastuti, 2016). Keraton sebagai pusatnya merupakan kawasan yang dikelilingi oleh Banteng Baluwarti yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi bangunan. Di
	Masjid Agung	
	Pasar	

Konsep	Komponen	Uraian
	Alun-alun	sebelah barat terdapat Masjid Agung, sebelah timur terdapat pasar, dan di sebelah utara dan selatan terdapat alun-alun. Keberadaan Masjid Agung, pasar, dan alun-alun selain sebagai elemen dari kosmologi Jawa juga berfungsi sebagai fasilitas perkotaan yang sekaligus menandakan bahwa kawasan keraton merupakan pusat kota.
Mancalima	Negara	Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kedudukan dan jabatan seseorang. Keraton sebagai pusat menduduki hirarki tertinggi dalam konsep <i>mancalima</i> . Selanjutnya di <i>kuthanegara</i> tinggal masyarakat kelas atas, abdi dalem keraton, penduduk pendatang dari Eropa dan Arab, serta terdapat berbagai fasilitas yang mendukung wilayah ini sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Di <i>Negara Agung</i> , tinggal para petani dan pekerja perkebunan. Wilayah memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan sebagai tanah pertanian dan <i>tanah lungguh</i> . Mancanegara merupakan wilayah terluar yang berfungsi sebagai <i>siti pamaosan</i> atau tanah pajak
	Kuthanegara	
	Negara Agung	
	Mancanegara	
Kiblat Papat Lima Pancer	Utara – Alas Krendawahana	Diyakini sebagai keselarasan antara dunia manusia dan alam semesta, struktur ruang yang ada dibangun berdasarkan orientasi empat penjurus mata angin dengan masing-masing penjaga spiritualnya. Struktur <i>kiblat papat lima pancer</i> merupakan sumbu imajiner dari arah pembangunan Kota Surakarta (Julianto, 2017). Sumbu mata angin utara-selatan bersifat sakral, serta timur-barat bersifat profan.
	Timur – Gunung Lawu	
	Selatan – Laut Selatan	
	Barat – Gunung Merapi dan Merbabu	



**Gambar 6.** Peta konsep kiblat Papat Lima Pancer Kota Surakarta.

### 3.4. Perkembangan pusat pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan kosmologi Jawa

Berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Surakarta memberikan banyak pengaruh terhadap keberadaan pusat pemerintahan. Faktor politis adalah hal utama yang memunculkan pusat pemerintahan baru maupun memunculkan kebijakan atas pemindahan wewenang akan Kota Surakarta. Sejak awal berdirinya, Keraton adalah pusat pemerintahan Kota Surakarta. Kemudian terjadi peristiwa Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga yang membagi wilayah kekuasaan keraton kepada Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Pemerintah Hindia Belanda turut memberikan imbas kepada keraton karena mereka juga memiliki hak atas tanah jajahan yang kemudian diutus residen sebagai pengawas. Kemerdekaan Indonesia memunculkan semangat kesatuan dan kesetaraan sehingga muncul perlawanan akan keberadaan swapraja yang pada akhirnya membentuk pemerintah kota yang berwenang atas segala aset milik swapraja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pusat pemerintahan yang sesuai dengan konsep kosmologi Jawa adalah Keraton Kasunanan Surakarta karena pemilihan konsep tersebut sudah direncanakan sejak masa awal pembangunannya. Menurut Santoso [3], struktur keruangan kota disusun dari sistem klasifikasi dalam kosmologi yang diaplikasikan di dalamnya. Selain itu, kosmologi Jawa juga mengatur hubungan manusia dengan bangunan, sehingga struktur ruang dan bangunan tidak hanya menjadi sarana dan fasilitas, melainkan menjadi suatu keterpaduan dengan aktivitas di dalamnya yang menjadikan kedua hal tersebut memiliki makna dan mencerminkan sistem kemasyarakatan yang berlaku. Kadipaten Mangkunegaran tidak memiliki wewenang untuk menggunakan kosmologi Jawa karena kedudukannya berada di bawah keraton. Sementara itu, Kantor Residen dibangun di pusat kota mengikuti konsep kota modern, begitu pula dengan pembangunan Balai kota yang dulunya merupakan rumah dinas residen di Surakarta. Tabel 2 menunjukkan keterkaitan antara pola ruang kawasan pusat pemerintahan di Kota Surakarta dengan konsep kosmologi Jawa.

**Tabel 2.** Keterkaitan pola ruang pusat pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan kosmologi Jawa.

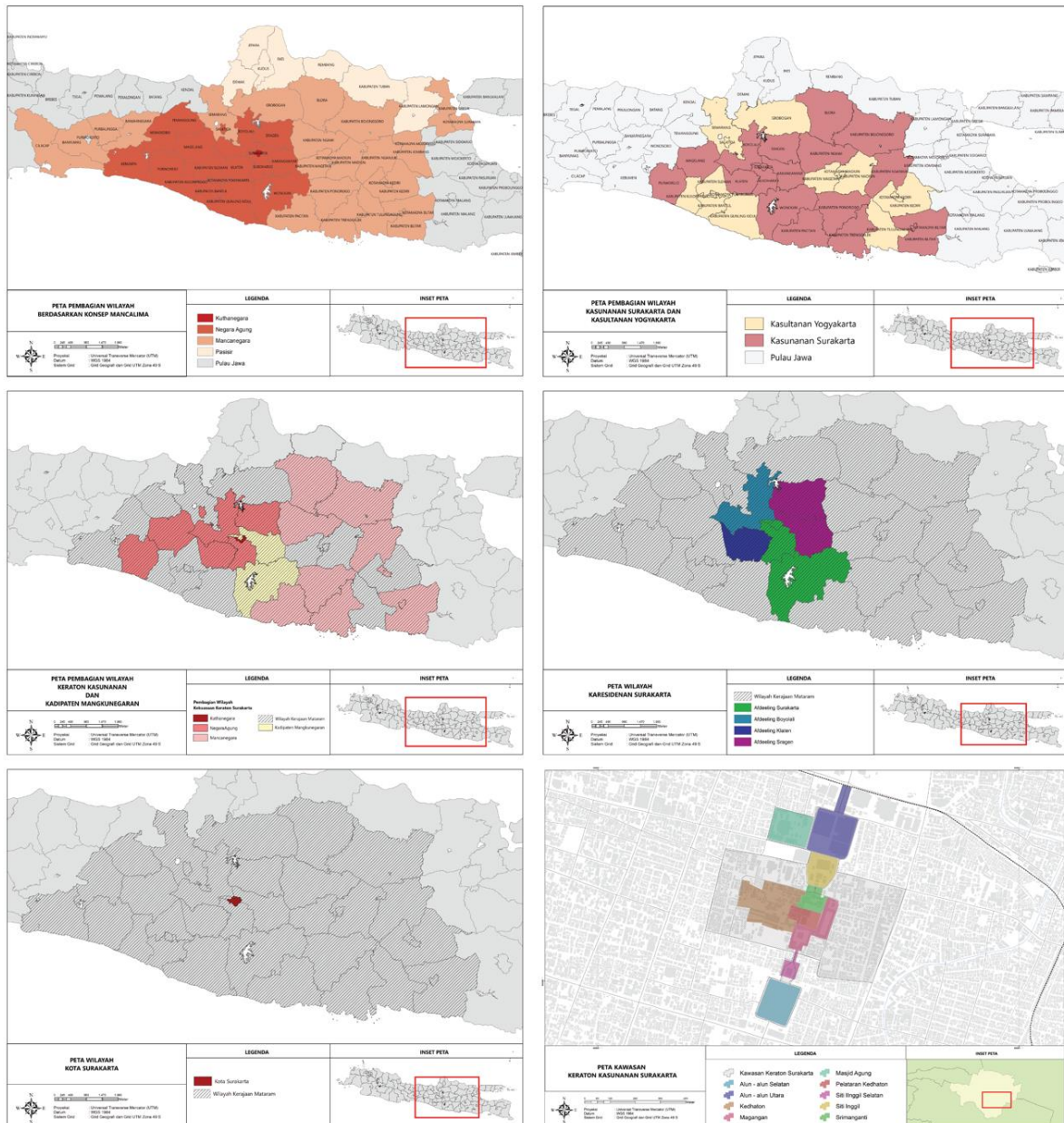
Konsep Kosmologi Jawa	Periode			
	Kerajaan		Kolonial	Republik
	Kasunanan	Mangkunegaran		
Mancapat	Ada dan sesuai dengan kosmologi	Tidak memiliki alun-alun karena kedudukan Kadipaten Mangkunegaran berada di bawah Keraton Surakarta	- Pusat pemerintahan berada di Kantor Residen dan Gubernur. - Penduduk eropa banyak tinggal di kawasan Loji Wetan dan di dalam Benteng Vastenburg	- Pusat pemerintahan berada di Balai Kota - Bagian diluar <i>kedhaton</i> tidak lagi ditinggali oleh abdi dalem.

Konsep Kosmologi Jawa	Periode			
	Kerajaan		Kolonial	Republik
	Kasunanan	Mangkunegaran		
Mancalima	Ada dan sesuai dengan kosmologi sampai dengan tahun 1755, yaitu ketika terjadi pembagian wilayah atas Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta	Mendapat bagian dari <i>negara agung</i> yang kemudian menjadi wilayah Vorstenlanden	- Wilayah pesisir <i>mancanegara</i> diambil alih oleh Belanda - Dibentuk karesidenan yang mencakup wilayah kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran	Luas wilayah Surakarta berkurang menjadi luasan administratif seperti saat ini yang dulunya merupakan wilayah <i>kuthanegara</i>
Catur Gatra Tunggal	Ada dan sesuai dengan kosmologi, dan masih tampak hingga saat ini	Hanya memenuhi dua komponen yaitu Istana dan Masjid yang berada di sisi barat	Tidak ada	Tidak ada
Kiblat Papat Lima Pancer	Ada dan sesuai dengan kosmologi	Dilakukan usaha penyetaraan kedudukan sumbu imajiner dengan membangun pabrik gula di sebelah barat dan timur	Tidak ada	Tidak ada

Keraton yang dulunya merupakan pusat pemerintahan yang menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah mancalima, kini hanya memiliki wewenang atas kawasannya sendiri. Selain itu, konsep mancapat yang membagi penduduk berdasarkan kasta dan mata pencaharian telah hilang akibat perubahan sosial di Surakarta. Konsep yang masih dapat diamati pada saat ini adalah Catur Gatra Tunggal dan kiblat Papat Lima Pancer. Pada kedua konsep ini juga masih sering dilakukan upacara pada hari-hari tertentu. Gambar 7 menunjukkan bagaimana konsep kosmologi berkembang seiring waktu.

Kedatangan bangsa Eropa pada awal tahun 1800 banyak memberi pengaruh terhadap pola ruang Surakarta yang awalnya kental dengan tatanan tradisional menjadi kota yang lebih modern seiring dengan dibangunnya berbagai fasilitas milik Eropa. Sejak awal masuknya bangsa Eropa di Surakarta, pemerintah kolonial telah memiliki posisi dalam sistem pemerintahannya meskipun tidak secara langsung. Pada pola ruang, dapat dilihat bahwa lokasi Benteng Vastenburch yang merupakan bangunan pertahanan berlokasi dekat dengan keraton, yang mana hal tersebut merupakan suatu keterikatan dan pengawasan antara pihak VOC dan keraton. Selain bangunan Benteng, di Surakarta juga terdapat Kantor Residen dan Gubernur VOC yang memiliki wewenang terhadap wilayah kekuasaan keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran. Lokasi kedua bangunan tersebut juga berada di dekat keraton. Hal ini

berpengaruh terhadap perkembangan kawasan keraton dan sekitarnya menjadi pusat kota pada saat ini.



**Gambar 7.** Perkembangan wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta

#### 4. Kesimpulan

Pusat Pemerintahan Surakarta banyak mengalami perkembangan, mulai dari waktu dipindahkannya keraton dari Kartasura ke Surakarta, masa pemerintahan kolonial, hingga masa pemerintahan sipil seperti saat ini. Sistem tata ruang di Surakarta pada awalnya dibangun berdasarkan prinsip yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang setiap bangunan dan tata letaknya memiliki berbagai simbol yang berkaitan dengan perjalanan hidup manusia serta

gambaran alam semesta. Pergantian sistem pemerintahan yang dianut juga turut mengubah lokasi pusat pemerintahan serta sistem tatanan yang awalnya berupa kosmologi hingga berubah menjadi luasan administratif. Perubahan ini berdampak besar terutama pada konsep kosmologi mancalima yang merupakan sistem pembagian wilayah kekuasaan keraton. Mulanya konsep mancalima mencakup sebagian besar wilayah Jawa Tengah, kemudian berkurang lagi akibat pembagian wilayah pada saat peristiwa Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga, kemudian berkurang lagi ketika terbentuk pemerintahan residen dan pemerintahan kota, hingga pada saat ini keraton hanya memiliki wewenang terhadap kawasan keraton itu sendiri.

### Referensi

- [1] Zaida SNA, Arifin NHS. Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan Di Jawa. *J Lanskap Indones* 2010;2:83–92. <https://doi.org/10.29244/jli.2010.2.2.%25p>.
- [2] Priandito Y. Sejarah Kota Solo. Solo Vacat 2010. <http://solodolan.blogspot.com/2010/11/sejarah-kota-surakarta-bermula-ketika.html> (accessed July 23, 2022).
- [3] Santoso J. *Arsitektur-kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa*. Jakarta: Centropolis; 2008.
- [4] Suryanto, Djunaedi A, Sudaryono. Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. *J Perenc Wil Dan Kota* 2015;26:230–52. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.3.6>.
- [5] Drajat SU. *The Rationale Behind Urban Form of the Javanese Inland Cities: Urban Morphology of Shifting Capitals of Islamic Mataram Kingdom and Its Successors*. National University of Singapore, 2008.
- [6] Lombard D. *Nusa Jawa III: Warisan Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2018.
- [7] Mulyanto DW. *Eksistensi Tata Ruang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Tahun 2008*. Universitas Sebelas Maret, 2009.
- [8] Miksic JN, Florida N. *Karaton Surakarta*. Jakarta: Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta; 2004.
- [9] Junianto. Konsep Mancapat-Mancalima dalam Struktur Kota. *MINTAKAT J Arsit* 2019;20:107–31. <https://doi.org/10.26905/mj.v20i2.3987>.
- [10] Kusumastuti. Proses Dan Bentuk “Mewujudnya” Kota Solo Berdasarkan Teori City Shaped Spiro Kostof. *Reg J Pembang Wil Dan Perenc Partisipatif* 2016;7:33–42. <https://doi.org/10.20961/region.v7i1.5782>.
- [11] Karaibrahimoğlu S, Demirkan Ö. A Review of Modernization: The Giresun Government House and Administrative Center. *Int J Archit Plan* 2020;8. <https://doi.org/10.15320/ICONARP.2020.121>.
- [12] Gibberd F. *Town Design*. London: The Architectural Press; 1953.
- [13] Aurumbita YN. *Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru*. Universitas Gajah Mada, 2015.
- [14] Bundschuh-Rieseneder F. Good Governance: Characteristics, Methods and the Austrian Examples. *Transylvanian Rev Adm Sci* 2008;4:26–52.

- [15] Febriani HP. Pemberian Motivasi Kepala Perpustakaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pustakawan di UPT Perpustakaan IAIN Surakarta. *J Ilmu Perpust* 2012;1.
- [16] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2017.
- [17] Basundoro P. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak; 2012.
- [18] Susanto. *Komunikasi Personal* 2019.
- [19] Topografische dienst in Nederlandsch-Indie. Digital Collection: Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling (de residentien Djokjakarta en Soerakarta en het regentschap Krawang in hun geheel), de dichtheid der inlandsche bevolking volgens de in 1895 gehouden telling, tevens taalkaart 1895.
- [20] Paulus J, Stibbe DG, de Graaff S. *Encyclopaedie van Nederlansch Indie*. Leiden: Martinus Nijhoff; 1905.
- [21] Mulyadi MH, Soedarmono. *Runtuhnya kekuasaan "Kraton Alit" : studi radikalisisasi sosial "wong Sala" dan kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan; 1999.
- [22] Topografische Inrichting (Batavia). Digital Collection: Overzichtskaat van de residentie Soerakarta 1920.